

PERAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA DALAM MENDUKUNG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN AKIBAT PERKEMBANGAN KAWASAN SOLOBARU KABUPATEN SUKOHARJO

Arkanudin Rizki Permono¹, Vincent Hadi Wiyono², Lukman Hakim³

¹Mahasiswa Magister Ekonomi & Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sebelas Maret-SURAKARTA

^{2,3} Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sebelas Maret-SURAKARTA

ABSTRAK

Pembangunan Kawasan Solo Baru dan Kartasura memberikan daya dukung bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Konsep Kawasan Solo Baru dan Kartasura sebagai kota satelit mandiri dengan konsep permukiman yang didukung oleh ketersediaan fasilitas penunjang akan berimbas pada perubahan pemanfaatan lahan. Perubahan pemanfaatan lahan memberikan dampak pada sektor pertanian. Keberadaan sektor pertanian sebagai penyedia lumbung pangan nasional di Kabupaten Sukoharjo semakin terancam karena lahan pertanian berubah fungsi menjadi kawasan industri non pertanian. Pemberdayaan petani menjadi perhatian penting untuk menghadapi kondisi perubahan ini. Pelibatan petani sebagai penyuluh pertanian swadaya merupakan alternatif solusi pemberdayaan petani.

Alternatif solusi ini sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran penyuluh pertanian swadaya dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat perkembangan Kawasan Solo Baru di Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, *Focus grup discussion* (FGD), dan dokumentasi. Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki 3 (tiga) peran. Pertama, distribusi informasi program pemerintah kepada anggota kelompok tani setiap kecamatan. Kedua, penguatan posisi tawar petani kepada pemerintah dan swasta. Ketiga, pengorganisasian kelompok tani melalui pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro; fasilitator usaha tani; serta pelaksanaan kegiatan kunjungan antar kelompok tani.

Kata kunci: Penyuluh Pertanian Swadaya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Solo Baru

ABSTRACT

The development of the Solo Baru and Kartasura Regions provides support for the economic growth of Sukoharjo Regency and Solo City. The concept of the Solo Baru and Kartasura Regions as independent satellite cities with the concept of settlements supported by the availability of supporting facilities will impact on land use changes. Changes in land use have an impact on the agricultural sector. The existence of the agricultural sector as a provider of national food barns in Sukoharjo Regency is increasingly threatened because agricultural land has changed its function to become a non-agricultural industrial area. Farmer empowerment is an important concern to deal with these changing conditions. The

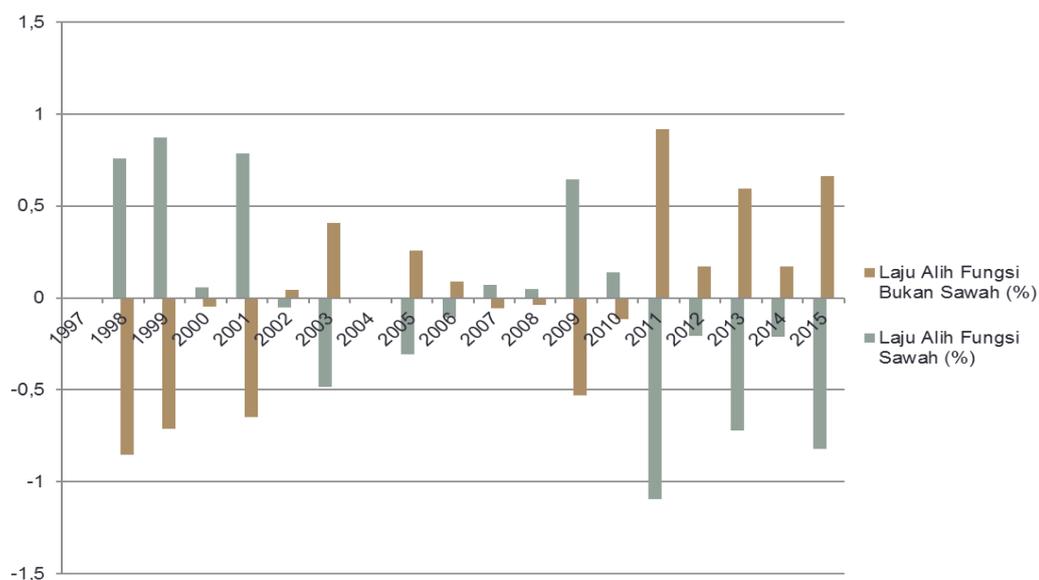
involvement of farmers as independent agriculture instructors is an alternative solution for empowering farmers.

This alternative solution is in accordance with Law Number 16 of 2006 concerning Agricultural, Fisheries and Forestry Extension Systems. This study aims to describe the role of independent agriculture instructors in supporting the protection of sustainable agricultural land due to the development of the New Solo Region in Sukoharjo Regency. The research method uses a qualitative descriptive approach, data collected through interviews, observation, Focus group discussions (FGD), and documentation. Self-supporting Agricultural Extension Workers have 3 (three) roles. First, the distribution of government program information to farmer group members in each sub-district. Second, strengthening the bargaining position of farmers to the government and the private sector. Third, organizing farmer groups through the management of Microfinance Institutions; farm business facilitators; and conducting farmer group visiting activities.

Keywords: *Self-Help Agricultural Extension Workers, Sustainable Food Agriculture Land, New Solo*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian pangan memberi kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Bappenas (2013:2), kontribusi tanaman bahan makanan sebesar 7,5% tahun 2010; 7,1% tahun 2011; 7% tahun 2012; dan 7,5% tahun 2013. Namun pembangunan sektor pertanian pangan sering berlawanan dengan pertumbuhan sektor non pertanian. Pertumbuhan sektor non pertanian mengakibatkan perubahan fungsi lahan pertanian. Perubahan fungsi lahan akibat urbanisasi penduduk kota utama ke wilayah peri urban untuk mencari peluang dari pertumbuhan sektor non pertanian. Urbanisasi menurut Setiawan (2005), suatu penambahan penduduk perkotaan. Know (1994), urbanisasi dipengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi. Salah satu dampak urbanisasi mengakibatkan transisi sosial-ekonomi antara perkotaan dan pedesaan di Wilayah Peri Urban (WPU).



Gambar 1.Laju Alih Fungsi Sawah dan Bukan Sawah
Sumber :BPS Sukoharjo, 2000-2016

Pemberdayaan petani menjadi perhatian penting untuk menghadapi kondisi perubahan ini. Pelibatan petani sebagai penyuluh pertanian swadaya merupakan alternatif solusi pemberdayaan petani. Alternatif solusi ini sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 61 tahun 2008 tentang penyuluh pertanian swadaya sebagai mitra penyuluh pertanian PNS. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran penyuluh pertanian swadaya dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat perkembangan Kawasan Solo Baru di Kabupaten Sukoharjo.

KERANGKA TEORI

Pembangunan Berkelanjutan

Berkelanjutan merupakan paradigma dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan muncul pada awal 1970-an yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan polusi akibat pembangunan industri yang dilakukan. Atas dasar itulah Konferensi Stockholm diselenggarakan pada tahun 1972 diikuti dengan pembentukan The First Governing Council di Nairobi. Konferensi yang dibentuk bertujuan untuk menyelesaikan persoalan lingkungan fisik global baik yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sementara Mannion menyebutkan bahwa konsep sustainable development adalah suatu kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource.

Sutamihardja (2004), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Komunikasi Pembangunan

Menurut Peterson, komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi yang secara umum berlangsung dalam negara sedang berkembang (Dilla, 2007:115). Komunikasi pembangunan ada pada segala macam tingkatan, dari seorang petani sampai pejabat pemerintah dan negara, termasuk juga di dalamnya dapat berbentuk pembicaraan kelompok, musyawarah pada lembaga resmi siaran dan lain – lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat melalui proses komunikasi.

Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara – negara sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi. Komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberikan laporan yang tidak realistis dari fakta – fakta atau sekedar penonjolan diri. Tujuan komunikasi adalah untuk menanamkan gagasan – gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Secara pragmatis dapat dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara (Harun dan Ardianto, 2011:161).

Pemilihan strategi komunikasi merupakan hal yang utama dan penting dalam perencanaan pembangunan. Setiap strategi yang berbeda memerlukan penekanan yang berbeda pada proses utamanya, dan pendekatannya pun bisa berbeda bergantung pada situasi dan kondisi. Menurut Rogers (1976) fungsi komunikasi pada konteks ini dianggap sebagai mekanisme untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Karena itu pemerintah senantiasa perlu memperhatikan strategi apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efeknya sesuai dengan harapan (Dilla, 2007:131).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif. Data dikumpulkan dengan *Observasi* dalam kegiatan *Focus grup discussion* (FGD) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Grogol pada 18 Desember 2019 dan Penyuluh Pertanian Swadaya Seluruh Kabupaten Sukoharjo pada 19 Desember 2019. Kegiatan FGD berupa pembahasan Kartu Tani; Penanganan Hama dan Penyakit; Asuransi Pertanian; pengelolaan Dana Koperasi KTNA; pengelolaan bantuan alat produksi pertanian dari pusat; dan koordinasi program pameran hasil produksi pertanian Kabupaten Sukoharjo. Triangulasi data melalui wawancara mendalam dengan Pengurus KTNA Kecamatan Grogol; Pengurus Penyuluh Pertanian Swadaya Kecamatan Grogol; Ketua Penyuluh Pertanian Swadaya Kabupaten Sukoharjo; Koordinator Penyuluh Pertanian PNS Kecamatan Grogol; dan Koordinator Penyuluh Pertanian PNS Kabupaten Sukoharjo.

DISKUSI

Penyuluh Pertanian Swadaya : Komunikator Program Pemerintah

Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Menurut Syahyuti (2019:9), peran penyuluh pertanian swadaya sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2006. Petani sebagai penyuluh memiliki sikap pembaharu, motivator, organisator komunitas, dan pemimpin langsung di lapangan. Selain itu, peran penyuluh pertanian swadaya sebagai mitra penyuluh pertanian PNS sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 61 tahun 2008. Dukungan dan keberadaan penyuluh swadaya saat ini cukup besar. Sebagai contoh, dari sisi jumlah, jumlah penyuluh per juli 2011 sebanyak 52.428 orang, terdiri dari penyuluh PNS 27.961 orang, penyuluh honorer 1.251 orang, THL-TB 23.216 orang, dan Penyuluh Swadaya sebanyak 8.107 orang (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2013).

Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki peran media komunikasi program pemerintah terkait pertanian. Program itu terdiri dari: Kartu Tani; Asuransi Pertanian; Bantuan alat – alat produksi yang berupa bantuan traktor; dan Penyaluran dana hibah Lembaga Keuangan Mikro.



Koordinasi Kegiatan (PPS) Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Program tersebut menjadi perbincangan forum diskusi KTNA pada 18 Desember 2019 dan Penyuluh Pertanian Swadaya pada 19 Desember 2019. Frekuensi diskusi program tersebut karena pemerintah provinsi Jawa Tengah sedang gencar memberikan insentif pertanian pangan agar produksi pangan dapat berjalan baik. Ketika produksi berjalan baik, akan memberikan dampak pada stabilitas harga pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Penyuluh Pertanian Swadaya : Katalisator Posisi Tawar Petani

Posisi tawar petani merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Petani memiliki posisi tawar yang rendah dari segi harga jual gabah, perjanjian sewa lahan pertanian, dan keterlibatan dalam keputusan kebijakan pemerintah. Harga jual gabah kering sering menjadi permainan pedagang gabah/ penyalur gabah ke tempat penggilingan. Petani memiliki keterbatasan informasi mengenai harga gabah. Perjanjian sewa lahan pertanian, petani memiliki kelemahan dalam segi hukum. Perjanjian ini biasa terjadi dalam bentuk lisan dan asas kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penyewa. Sedangkan, petani sering termajinalkan dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan pemerintah. Publikasi informasi kegiatan yang disampaikan ke pemerintah menjadi sumber utama posisi tawar ini yang kurang. Petani hanya dipandang sebagai objek yang bersifat *top down*.



Kartu Tani : Upaya Manajemen Komunikasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Penyuluh Pertanian Swadaya mampu memperkuat posisi tawar dari harga jual gabah, perjanjian sewa lahan pertanian, dan keterlibatan dalam keputusan kebijakan pemerintah. Peran penguatan posisi tawar dapat dilakukan penyuluh pertanian swadaya dengan menjaga frekuensi komunikasi KTNA, penyuluh pertanian PNS, pemerintah Desa, dan pemerintah Kecamatan. Jangkauan wilayah komunikasi penyuluh pertanian swadaya tidak hanya dalam lingkup desa dan kecamatan. Terbentuknya forum komunikasi Penyuluh Pertanian Swadaya tingkat Kabupaten mampu memperkuat koordinasi antar petani di desa dan kecamatan. Penyuluh Pertanian Swadaya tingkat Kabupaten mampu mengurangi jarak komunikasi dengan Bupati. Kondisi ini berdampak pada penguatan publikasi setiap kegiatan petani pada pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Penyuluh Pertanian Swadaya : Penguat Organisasi Petani

Jangkauan wilayah Penyuluh Pertanian Swadaya yang meliputi Desa, Kecamatan, dan Kabupaten memiliki keuntungan untuk dapat memperoleh informasi lebih banyak dan berbagi solusi setiap masalah yang dihadapi pada tiap tingkatan wilayah. Selain itu, penyuluh pertanian swadaya mendapatkan pelatihan intensif dari Dinas Pertanian. Kondisi jangkauan wilayah dan pelatihan insentif ini dapat memperkuat kelompok tani ketika penyuluh pertanian swadaya kembali dalam wilayah usaha tani dia di tingkat Desa. Secara tidak langsung, kelompok tani tingkat desa memiliki kekuatan informasi untuk menjalankan usaha tani.

Penyuluh Pertanian Swadaya yang berasal dari petani yang berpengalaman dan sukses menumbuhkan sikap kepercayaan petani pada penyampaian setiap informasi. Modal kepercayaan petani mempermudah penerapan inoasi pertanian yang dibutuhkan petani. Modal kepercayaan ini mampu memberikan rasa tenang pada petani dalam pengelolaan dana yang disetorkan melalui Lembaga Keuangan Mikro dibawah koordinasi Gabungan Kelompok Tani.

KESIMPULAN

Penyuluh Pertanian Swadaya mampu menumbuhkan sikap kepedulian organisasi petani dalam menghadapi pertumbuhan Kawasan Solo Baru. Sikap kepedulian ini memotivasi petani untuk melakukan usaha tani. Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki 3 peran dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pertama, distribusi informasi program pemerintah kepada anggota kelompok tani setiap kecamatan. Kedua, penguatan posisi tawar petani kepada pemerintah dan swasta. Ketiga, pengorganisasian kelompok tani melalui pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro; fasilitator usaha tani; serta pelaksanaan kegiatan kunjungan antar kelompok tani

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. 2013. Data Penyuluh Pertanian Swadaya sampai dengan Juli 2011. <http://cyber.deptan.go.id/page/penyuluh-swadaya>. Diakses 27 Februari 2019
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2013. *Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) BidangPangan Dan Pertanian 2015-2019*. DirektoratPangan Dan Pertanian. KementrianPerencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2000 sampai dengan 2016. <http://sukoharjokab.bps.go.id>. Diakses 01 Januari 2019
- Dilla, Sumadi. 2007. Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- DinasPertanianKabupatenSukoharjo. 2015. *AlihFungsiLahanSukoharjo*. sukoharjokab.go.id diakses pada 7 April 2017
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2010. Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 61 tahun 2008 tentang penyuluh pertanian swadaya sebagai mitra penyuluh pertanian PNS
- Rahmayana, L. Dan Handayani, W. 2016. Transformasi Sosial Ekonomi Penduduk Lokal Akibat Adanya Pembangunan Di Kawasan Solo Baru Kabupaten Sukoharjo. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) vol 5(3): 174-185*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id>
- Setiawan, N. 2005. *Perubahan Konsep Perkotaan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Analisis Urbanisasi*. Universitas Padjadjaran. Bandung
- Sutamihardja, 2004 *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan